

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

James C. Hsiung meneliti tentang keadaan sengketa yang melibatkan antara China dan Jepang terkait sengketa kepulauan Senkaku di laut China Timur dalam bukunya yang berjudul *China and Japan at Odds Deciphering the Perpetual Conflict* yang diterbitkan oleh Palgrave Macmillan 2007. Pertama, buku ini menjelaskan akar penyebab permusuhan yang lama antara China dan Jepang. Kedua, buku ini menyoroti bahayanya apabila kedua negara tidak bisa meredam emosi yang diakibatkan oleh sengketa terhadap status kepemilikan Kepulauan Senkaku tersebut, serta akan sulit untuk mencapai kesepakatan karena keduanya saling agresif. Bahkan buku ini juga menjelaskan konsekuensi yang harus diterima apabila sengketa ini menjadi konflik bersenjata dan akan menjadi bencana bagi kedua negara.

Sengketa antara China dan Jepang didasari oleh faktor politik dan sejarah masa lalu, dimana kepulauan Senkaku/Diaoyu secara historis merupakan milik China tetapi dibawah kendali Jepang. Hal inilah yang menjadi kedua negara sulit untuk mencapai kesepakatan. Ditambah lagi dengan China yang selalu menghindari ajakan Jepang untuk membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional. Alasan penulis mengambil buku ini sebagai tinjauan pustaka adalah buku ini menjelaskan kompleksitas awal mula terjadinya sengketa sehingga akan menjadi latar belakang penulis untuk menjelaskan fakta-fakta mengenai sengketa antara China dan Jepang. Peran negara sekutu Jepang

yaitu Amerika Serikat sebagai sekutu telah menyatakan bahwa ia tetap menjadi seorang pengamat di Laut Cina Timur terkait sengketa kedaulatan tersebut, AS akan membantu Tokyo dalam mengklaim bahwa pulau-pulau Senkaku jatuh di bawah kontrol Jepang setelah Perang Dunia II. Berdasarkan perjanjian keamanan AS-Jepang, yang berarti Washington akan mendukung Tokyo dalam serangan Beijing atas pulau-pulau yang di sengkatakan di Laut China Timur, yang pada gilirannya dapat memicu reaksi berantai yang membentang di seluruh Asia Pasifik dan sekitarnya. Berdasarkan sejarah masa lalu dimana kemenangan AS terhadap Jepang pada Perang Dunia II, AS mempunyai otoritas yang lebih terhadap Jepang sebagai pemenang Perang Dunia II.

Dalam bab ini terdapat beberapa kajian terdahulu yang memuat sebuah konsep-konsep dan teori yang akan berhubungan dari fokus penelitian. Tidak banyak penelitian yang membahas negara Jepang sebagai aktor utama dalam penelitiannya, tetapi kebanyakan peneliti lebih mengarah pada pembahasan yang menggunakan Cina sebagai aktor utama. Sehingga penelitian dan analisis mengenai Kebijakan Jepang melalui National Security Strategy (NSS) dalam Menjaga Stabilitas di Laut Cina Timur masih sangat sedikit, terlebih pembahasan ini merupakan sebuah penelitian baru dalam melihat kebijakan baru yang dikeluarkan Jepang pada tahun 2022 untuk menjaga kestabilan di Laut Cina Timur. Penelitian ini akan memaparkan 10 (sepuluh) penelitian terdahulu yang membahas mengenai kebijakan Jepang dalam menjaga stabilitas regional atau yang berhubungan.

Literatur pertama untuk menjadi pembanding dengan karya tulis ini yaitu jurnal yang berjudul "*The Senkaku / Diaoyu Dispute*" yang ditulis oleh William Choong dalam karya tulis ini penulis membahas mengenai sengketa wilayah yang ada di

Kawasan asia timur terutama Kepulauan Senkaku yang diklaim oleh China dan Jepang. Dimulai dari Sejarah, kontraversi, maupun klaim masing-masing dari kedua negara tersebut. Terlepas dari itu karya tulis ini juga menjelaskan bagaimana sikap kedua negara dalam proses kepemilikan yang telah berlangsung sangat lama bermula dari tahun 1895 dan maupun sikap kedua negara tersebut mendirikan ADIZ di Kawasan asia timur dan juga adanya campur tangan AS pada saat pengembalian Senkaku kepada Jepang(Choong, 2014) .

Literatur kedua yaitu jurnal yang ditulis oleh Zihao Liu dengan judul : “*The Diaoyu/Senkaku Dispute And China’s Domestic Politics*” dalam karya tulis ini menjelaskan bahwa starategi yang dilakukan oleh Tiongkok dalam tujuan domestic yaitu dengan memprovokasi militer yaitu dengan kasus penembakan tanpa adanya geopolitik yang jelas contohnya adalah penembakan di Kepulauan Jinmen. Sehubungan dengan sengketa Kepulauan Senkaku ataupun Diaoyu tujuan domestik yang dilakukan oleh Tiongkok adalah dengan mengalihkan perhatian dari public dari krisis legitimasi, dengan menanamkan nasionalisme anti Jepang. Jurnal ini juga membahas kesamaan antara sengketa Diaoyu/Senkaku dan penembakan Jinmen dan Perang Falklands (Liu, 2016).

Literatur ketiga yaitu jurnal yang ditulis oleh Faustina Tamisari dan Dudy Heryadi yang berjudul “ Kebijakan Luar Negeri Jepang Terhadap Pemberlakuan Zona Identifikasi Pertahanan Udara China” jurnal ini membahas kebijakan dengan mendirikan ADIZ di kepulauan Senkaku oleh China dan menuai kontroversi, dikarenakan China dianggap telah bertindak secara unilateral dan agresif. Pascanya tidak ada hukum internasional yang mengatur tentang ADIZ ini sehingga menjadikan

China bebas dalam menjadikan kebijakan tersebut sebagai instrument legitimasi atas klaim kepemilikan kepulauan Senkaku. Akan tetapi, disisi lain Jepang merespon melalui kebijakannya yaitu *non-recognized* dan *non-acceptance* yang diberlakukan Jepang. Sehingga Jepang melarang seluruh penerbangan untuk beroperasi dan enggan untuk memberikan identitas diri terhadap badan yang berwenang di dekat perairan tersebut (Tamisari & Heryadi, 2017).

Literatur keempat sebagai pembanding dalam karya tulis ini yaitu jurnal yang berjudul “ Motivasi Tiongkok Mendirikan *Air Defense Identification Zone*(ADIZ) di Wilayah Laut China Timur” yang ditulis oleh Khairunnisa Jani Lubis, jurnal ini pun membahas bagaimana Kepulauan Senkaku ini menjadi sebuah *core interest* bagi China, semenjak China beralih ke energi alternatif yang dimana sebelumnya menggunakan batu bara. Kita semua tau bahwa cadangan gas dan minyak yang terdapat di Kepulauan tersebut sangat kaya, sehingga Tiongkok melakukan berbagai upaya apapun untuk bisa mengontrol kepulauan tersebut. Dan juga jurnal ini membahas bagaimana Tiongkok sangat fleksibel sekali dalam mendirikan ADIZ ini dikarenakan tidak bertentangan dengan hukum internasional. Disisi lain pendirian ADIZ ini pun bermaksud sebagai upaya Tiongkok dapat memperluas kontrol hukum dan administrasi atas Kepulauan tersebut (Khairunnisa, 2015).

Literatur kelima yang menjadi bahan pembanding pada penelitian ini ditulis oleh William B. Heflin dengan judul literatur : “*Diaoyu/Senkaku Islands Dispute : Japan and China, Ocean Apart*” dalam karya tulis ini penulis membahas tentang bagaimana masalah klaim bersejarah yang dilakukan oleh China dan juga Jepang dalam klaim kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Selain memiliki cadangan minyak dan

gas, Kepulauan Senkaku juga memiliki ikan yang melimpah disekitarnya. China dan Jepang berpendapat bahwa pelanggaran kedaulatan merupakan harga diri bagi negara mereka. Fakta bahwa China kalah dalam perang terhadap Jepang pada masa lalu mendorong China untuk menjadi lebih agresif dalam urusan kedaulatan dengan Jepang pada saat ini, mengingat memiliki kepentingan nasional yang sama dengan Jepang untuk memiliki Kepulauan tersebut. Jepang dan China merupakan salah satu negara besar di Asia Timur, sehingga kedua negara tersebut saling bersaing dalam hal militer, teknologi, dan bahkan ekonomi sekalipun (Heflin, 2000).

Literatur keenam yaitu penelitian yang dikemukakan oleh Fadhil Alghiffar dengan Raja Nathania Olga Letticia, penelitian ini berjudul “Analisis Teori OffenseDefense Pada Reformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Dalam Dinamika Keamanan Di Asia Timur” penelitian ini diterbitkan pada tahun 2016 sebagai penelitian yang dikeluarkan oleh “Global: Jurnal Politik Internasional”. Fokus dari penelitian ini adalah sebuah reformasi kebijakan pertahanan Jepang dalam pandangan teori offense-defense, penelitian ini merujuk pada sepuluh hipotesis, hipotesis ini dikemukakan oleh Van Evera yang berjudul penyebab terjadinya sebuah perang, dari penelitian ini terlihat bahwa dari ketiga diantaranya dapat memberikan penjelasan alasan dari sebuah military buildup yang dilakukan Jepang. Fadhil menggunakan paradigma structural realis yaitu dari mengacu sebuah teori offense-defense yang telah dipaparkan oleh Stephen Van Evera. Fadhil berusaha menganalisis beberapa faktor yang menjadikan Jepang melakukan reformasi kebijakan pertahanan, yaitu faktor penyebab perang dan faktor apa yang membuat terjadinya perang (Alghifari & Olga Letticia, 2016).

Literatur ketujuh yaitu Fadhil di dalam penelitiannya mencoba untuk menjelaskan bagaimana keterlibatan Jepang dengan mengeluarkan kebijakan pertahanannya sebagai penyeimbang offense-defense keamanan di Kawasan Asia Timur. Ditinjau dari beberapa aspek penilaian yaitu: peningkatan kapabilitas militer, kondisi geografi, tatanan sosial dan politik, serta diplomatik arrangements. Jepang meyakini bahwa tidak akan selamanya Amerika untuk mengurus permasalahan yang terjadi di Asia Timur, sehingga Jepang berusaha untuk memberikan pertahanan militer yang kuat yaitu dengan menggunakan kemampuan offensive dalam memberikan rasa aman bagi Jepang. Kemampuan offensive ini bukan berarti pemerintah Jepang akan berkelakuan yang sangat agresif yang terjadi pada saat di perang dunia II. Walaupun demikian, Amerika tetap berusaha mengajak kerja sama pertahanan dengan Jepang, guna menghadapi kebangkitan kekuatan Cina di Asia Timur (Alghifari & Olga Letticia, 2016).

Literatur kedelapan yang di tulis oleh Pradono Budi Saputro, dengan judul “Strategi Counterbalance Jepang di Tengah Persaingan Kepemimpinan dengan Tiongkok dalam Konteks Wacana Regionalisme Asia Timur”. Penelitian ini di publikasi pada tahun 2015 sebagai JURNAL POLINTER: KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL. Penelitian ini berfokus tentang bagaimana kebangkitan Tiongkok sebagai sebuah ancaman bagi negara yang ada di wilayah Asia Timur, atau bahkan sebagai sebuah ancaman bagi keamanan regional. Meningkatnya pengaruh Tiongkok di wilayah tersebut, menjadikan momentum bagi Jepang dalam memulai sebuah wacana pembentukan regionalisme baru dengan konsep yang lebih terbuka serta mengundang aktor lain diluar Regional dalam pembentukan Regional

Asia Timur, hal ini merupakan sebuah strategi yang dikeluarkan Jepang untuk menyeimbangkan kekuatan terhadap kekuatan Tiongkok (Saputro, 2016).

Literatur kesembilan dengan berjudul “Transformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 2014 (*Transformation of Japan's Defense Policy in 2014*)”, penelitian ini merupakan sebuah journal yang dikeluarkan oleh universitas jember. Penelitian ini di teliti oleh Wildan Saisol yang di publikasi pada tahun 2015. Penelitian ini berfokus pada perubahan kebijakan pertahanan Jepang pada tahun 2014 yang meluncurkan sebuah dokumen kebijakan *National Security Strategi* (NSS) serta Garis Besar Program Pertahanan Nasional Jepang atau *Nation Defense Program Guidelines NDPG*, dari dokumen itu pemerintah Jepang memberikan sebuah konsep baru dalam pengambilan kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang, yaitu konsep proaktif terhadap perdamaian oleh pemerintah perdana menteri Shinzo Abe (Faisol, 2015).

Literatur kesepuluh yaitu penelitian ketujuh yang diteliti oleh Destrina Christianty dkk. penelitian ini berjudul yaitu “GEOPOLITIK CINA DAN JEPANG DI ASIA TIMUR: SENKETA KEPULAUAN DIAOYU/SENKAKU” penelitian ini di terbitkan dalam *Journal Of Asia-Pasific Studies*. Fokus dari penelitian ini merupakan sebuah penyelidikan dalam perselisihan yang dilakukan Jepang dan Tiongkok terkait kepulauan Senkaku atau kepulauan Diaoyu dengan menggunakan pendekatan interaksi geografis atau geopolitik. Konflik tersebut dipicu oleh kepemilikan cadangan sumber daya alam minyak dan gas di kepulauan. Untuk pertama kali bahwa kepemilikan kepulauan tersebut dimiliki oleh pemerintah Jepang. Lalu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana Geopolitik Antara Tiongkok Dan Jepang Dalam Sengketa Kepulauan Diaoyu/Senkaku?. Destrina berupaya untuk mengetahui letak

sebuah geografis beberapa pulau tersebut serta sejarah kepemilikan beberapa pulau tersebut. Metode penelitian yang digunakan Destrina yaitu menggunakan metode deskriptif analitis serta pendekatan kualitatif, metode ini digunakan untuk memahami sebuah fenomena yang ada kaitannya dengan pengalaman yang diteliti (Christianty et al., 2019).

Pada tinjauan literatur yang telah penulis kemuka-kan maka terdapat persamaan dari kesepuluh literatur ilmiah yang memuat hasil penelitian terdahulu dan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sekarang, dan juga perbedaan yang telah penulis ketahui. Ada beberapa point yang sama dalam hal konflik sengketa wilayah yang terjadi di Kepulauan Senkaku antara China dan Jepang yang dimana saling ingin memiliki Kepulauan tersebut. Diantaranya ialah membahas tentang kebijakan yang dikeluarkan dan sikap agresif dari kedua negara tersebut. Yang menjadi perbedaannya yaitu kebijakan luar negeri China terhadap Jepang yang ingin penulis sampaikan dalam penulisan ini. Dan juga bentuk dari penyelesaian antara sengketa wilayah yang telah kedua negara tersebut sangat ingin mengklaim wilayah tersebut masuk kedalam kedaulatan kedua negara itu.

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

NO	PENULIS	TAHUN	JUDUL	TEMUAN
1	William Choong	2014	The Senkaku/ Diaoyu Dispute	Dalam karya tulis ini penulis membahas mengenai sengketa wilayah yang ada di Kawasan asia timur terutama

NO	PENULIS	TAHUN	JUDUL	TEMUAN
				<p>Kepulauan Senkaku yang diklaim oleh China dan Jepang. Dimulai dari Sejarah, kontroversi, maupun klaim masing-masing dari kedua negara tersebut. Terlepas dari itu karya tulis ini juga menjelaskan bagaimana sikap kedua negara dalam proses kepemilikan yang telah berlangsung sangat lama bermula dari tahun 1895 dan maupun sikap kedua negara tersebut mendirikan ADIZ di Kawasan asia timur dan juga adanya campur tangan AS pada saat pengembalian Senkaku kepada Jepang</p>
2	Zihao Liu	2016	The Diaoyu/Senkaku Dispute and China`s Domestic Politics	<p>Dalam karya tulis ini menjelaskan bahwa starategi yang dilakukan oleh Tiongkok dalam tujuan</p>

NO	PENULIS	TAHUN	JUDUL	TEMUAN
				<p>domestic yaitu dengan memprovokasi militer yaitu dengan kasus penembakan tanpa adanya geopolitik yang jelas contohnya adalah penembakan di Kepulauan Jinmen. Sehubungan dengan sengketa Kepulauan Senkaku ataupun Diaoyu tujuan domestic yang dilakukan oleh Tiongkok adalah dengan mengalihkan perhatian dari public dari krisis legitimasi, dengan menanamkan nasionalisme anti Jepang. Jurnal ini juga membahas kesamaan antara sengketa Diaoyu/Senkaku dan penembakan Jinmen dan Perang Falklands</p>
3	Faustina Tamisari dan Dudy Heryadi	2017	Kebijakan Luar Negeri Jepang Terhadap Pemberlakuan Zona	Jurnal ini membahas kebijakan dengan mendirikan ADIZ

NO	PENULIS	TAHUN	JUDUL	TEMUAN
			Identifikasi Pertahanan Udara China	di kepulauan Senkaku oleh China dan menuai kontroversi, dikarenakan China dianggap telah bertindak secara unilateral dan agresif. Pascanya tidak ada hukum internasional yang mengatur tentang ADIZ ini sehingga menjadikan China bebas dalam menjadikan kebijakan tersebut sebagai instrument legitimasi atas klaim kepemilikan kepulauan Senkaku. Akan tetapi, disisi lain Jepang merespon melalui kebijakannya yaitu non-recognized dan non- acceptance yang diberlakukan Jepang. Sehingga Jepang melarang seluruh penerbangan untuk beroperasi dan enggan untuk memberikan identitas diri

NO	PENULIS	TAHUN	JUDUL	TEMUAN
				terhadap badan yang berwenang di dekat perairan tersebut
4	Khairunnisa Jani Lubis	2015	Motivasi Tiongkok Mendirikan Air Defense Identification Zone(ADIZ) di Wilayah Laut China Timur	Jurnal ini pun membahas bagaimana Kepulauan Senkaku ini menjadi sebuah core interest bagi China, semenjak China beralih ke energi alternatif yang dimana sebelumnya menggunakan batu bara. Kita semua tau bahwa cadangan gas dan minyak yang terdapat di Kepulauan tersebut sangat kaya, sehingga Tiongkok melakukan berbagai upaya apapun untuk bisa mengontrol kepulauan tersebut. Dan juga jurnal ini membahas bagaimana Tiongkok sangat fleksibel sekali dalam mendirikan ADIZ ini dikarenakan tidak

NO	PENULIS	TAHUN	JUDUL	TEMUAN
				<p>bertentangan dengan hukum internasional.</p> <p>Disisi lain pendirian ADIZ ini pun bermaksud sebagai upaya Tiongkok dapat memperluas kontrol hukum dan administrasi atas Kepulauan tersebut</p>
5	William B. Heflin	2000	Diaoyu/Senkaku Islands Dispute : Japan and China, Ocean Apart	<p>Dalam karya tulis ini penulis membahas tentang bagaimana masalah klaim bersejarah yang dilakukan oleh China dan juga Jepang dalam klaim kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Selain memiliki cadangan minyak dan gas, Kepulauan Senkaku juga memiliki ikan yang melimpah disekitarnya. China dan Jepang berpendapat bahwa pelanggaran kedaulatan merupakan harga diri bagi negara</p>

NO	PENULIS	TAHUN	JUDUL	TEMUAN
				<p>mereka. Fakta bahwa China kalah dalam perang terhadap Jepang pada masa lalu mendorong China untuk menjadi lebih agresif dalam urusan kedaulatan dengan Jepang pada saat ini, mengingat memiliki kepentingan nasional yang sama dengan Jepang untuk memiliki Kepulauan tersebut. Jepang dan China merupakan salah satu negara besar di Asia Timur, sehingga kedua negara tersebut saling bersaing dalam hal militer, teknologi, dan bahkan ekonomi sekalipun.</p>

NO	PENULIS	TAHUN	JUDUL	TEMUAN
6	Fadhil Alghiffar, Raja Nathania Olga Letticia	2016	Analisis Teori OffenseDefense Pada Reformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Dalam Dinamika Keamanan Di Asia Timur	Fokus dari penelitian ini adalah sebuah reformasi kebijakan pertahanan Jepang dalam pandangan teori offese-defense, penelitian ini merujuk pada sepuluh hipotesis, hipotesis ini dikemukakan oleh Van Evera yang berjudul penyebab terjadinya sebuah perang, dari penelitian ini terlihat bahwa dari ketiga diantaranya dapat memberikan penjelasan alasan dari sebuah military buildup yang dilakukan Jepang. Fadhil menggunakan paradigma structural realis yaitu dari mengacu sebuah teori offense-defense yang telah dipaparkan oleh Stephen Van Evera. Fadhil berusaha menganalisis beberapa faktor yang menjadikan Jepang melakukan reformasi kebijakan

NO	PENULIS	TAHUN	JUDUL	TEMUAN
				<p>pertahanan, yaitu faktor penyebab perang dan faktor apa yang membuat terjadinya perang</p>
7	Fadhil Alghiffar, Raja Nathania Olga Letticia	2016	<p>Analisis Teori OffenseDefense Pada Reformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Dalam Dinamika Keamanan Di Asia Timur</p>	<p>di dalam penelitiannya mencoba untuk menjelaskan bagaimana keterlibatan Jepang dengan mengeluarkan kebijakannya sebagai penyeimbang offense-defense keamanan di Kawasan Asia Timur. Ditinjau dari beberapa aspek penilaian yaitu: peningkatan kapabilitas militer, kondisi geografi, tatanan sosial dan politik, serta diplomatik arrangements. Jepang meyakini bahwa tidak akan selamanya</p>

NO	PENULIS	TAHUN	JUDUL	TEMUAN
				<p>Amerika untuk mengurus permasalahan yang terjadi di Asia Timur, sehingga Jepang berusaha untuk memberikan pertahanan militer yang kuat yaitu dengan menggunakan kemampuan offensive dalam memberikan rasa aman bagi Jepang. Kemampuan offensive ini bukan berarti pemerintah Jepang akan berkelakuan yang sangat agresif yang terjadi pada saat di perang dunia II. Walaupun demikian, Amerika tetap berusaha mengajak kerja sama pertahanan dengan Jepang, guna menghadapi kebangkitan kekuatan Cina di Asia Timur</p>

NO	PENULIS	TAHUN	JUDUL	TEMUAN
8	Pradono Budi Saputro	2015	Strategi Counterbalance Jepang di Tengah Persaingan Kepemimpinan dengan Tiongkok dalam Konteks Wacana Regionalisme Asia Timur	<p>Penelitian ini berfokus tentang bagaimana kebangkitan Tiongkok sebagai sebuah ancaman bagi negara yang ada di wilayah Asia Timur, atau bahkan sebagai sebuah ancaman bagi keamanan regional.</p> <p>Meningkatnya pengaruh Tiongkok di wilayah tersebut, menjadikan momentum bagi Jepang dalam memulai sebuah wacana pembentukan regionalisme baru dengan konsep yang lebih terbuka serta mengundang aktor lain diluar Regional dalam pembentukan Regional Asia Timur, hal ini merupakan sebuah strategi yang dikeluarkan Jepang untuk menyeimbangkan kekuatan terhadap kekuatan Tiongkok</p>

NO	PENULIS	TAHUN	JUDUL	TEMUAN
9	Wildan Saisol	2015	Transformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 2014 (<i>Transformation of Japan's Defense Policy in 2014</i>)	Penelitian ini berfokus pada perubahan kebijakan pertahanan Jepang pada tahun 2014 yang meluncurkan sebuah dokumen kebijakan <i>National Security Strategi</i> (NSS) serta Garis Besar Program Pertahanan Nasional Jepang atau <i>Nation Defense Program Guidelines NDPG</i> , dari dokumen itu pemerintah Jepang memberikan sebuah konsep baru dalam pengambilan kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang, yaitu konsep proaktif terhadap perdamaian oleh pemerintah perdana menteri Shinzo Abe

NO	PENULIS	TAHUN	JUDUL	TEMUAN
10	Destrina Christianty,dkk.	2019	GEOPOLITIK CINA DAN JEPANG DI ASIA TIMUR: SENKETA KEPULAUAN DIAOYU/SENKAKU	Fokus dari penelitian ini merupakan sebuah penyelidikan dalam perselisihan yang dilakukan Jepang dan Tiongkok terkait kepulauan Senkaku atau kepulauan Diaoyu dengan menggunakan pendekatan interaksi geografis atau geopolitik. Konflik tersebut dipicu oleh kepemilikan cadangan sumber daya alam minyak dan gas di kepulauan. Untuk pertama kali bahwa kepemilikan kepulauan tersebut dimiliki oleh pemerintah Jepang. Lalu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana Geopolitik Antara Tiongkok Dan Jepang Dalam Sengketa Kepulauan Diaoyu/Senkaku?. Destrina berupaya untuk mengetahui letak sebuah geografis beberapa pulau tersebut serta sejarah

NO	PENULIS	TAHUN	JUDUL	TEMUAN
				<p>kepemilikan beberapa pulau tersebut. Metode penelitian yang digunakan Destrina yaitu menggunakan metode deskriptif analitis serta pendekatan kualitatif, metode ini digunakan untuk memahami sebuah fenomena yang ada kaitannya dengan pengalaman yang diteliti.</p>

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025).

2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual

Dalam menganalisis berbagai permasalahan maupun fenomena yang terjadi dalam penelitian ini penulis akan menggunakan realisme sebagai landasan teori ini dan juga kerangka berpikir utama dalam memandang masalah keamanan yang menyangkut dampak keseimbangan kekuatan dan juga pengaruh strategi China dari kebijakan yang telah dibuat oleh China dalam menghadapi klaim kepemilikan Kepulauan Senkaku oleh Jepang. Selain itu teori-teori lainnya yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu keamanan nasional.

2.2.1 Realisme

Salah satu teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisme klasik. Asumsi dasar dari perspektif realisme klasik berasal dari asumsi yang memandang bahwa pada dasarnya, watak dasar seorang manusia adalah egoistik dan agresif, hal

tersebut menunjukkan bagaimana manusia hanya memikirkan pencapaian kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan bersama. Menurut Machiavelli (Machiavelli dkk, 1988; Mansfield, 1988) sifat manusia secara alamiah merupakan gabungan binatang dan manusia, yang dimana aturan hukum anyu berlaku pada sisi manusia dari hakikat manusia, dan sisi binatang dari manusia mengharuskan seorang penguasa yang bijaksana untuk melawan kejahatan dengan kejahatan dan sekaligus menjadi singa dan manusia (Quentin, 1981). Menurut Zhang (2023) arti singa dalam pandangan Machiavelli mengacu pada kenegaraan tradisional yang mendominasi dan menggunakan rasa takut serta paksaan. Secara sederhana, pendapat Machiavelli dapat diartikan bahwa manusia melakukan segala cara untuk mewujudkan kepentingannya (Zhang, 2023). Sedangkan menurut Hobbes dalam (Moloney, 2011) berpendapat bahwa manusia adalah sama, manusia berinteraksi dengan lingkungan yang bersifat anarkis, dan manusia diarahkan pada kompetisi, rasa tidak percaya diri dan pengejaran kemuliaan (Moloney, 2011). Pandangan realisme klasik dari Hobbes menurut Gauthier (1969) menekankan pada premis hubungan antara anarki, keamanan dan tatanan politik, premis Hobbes adalah bahwa keamanan jasmani adalah kebutuhan utama manusia, dan "Tujuan besar Hobbes adalah menunjukkan kepada manusia jalan menuju keamanan (Gauthier, 1969)."

Dalam teori realisme menekankan peran penting negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional dan juga kekuasaan dari suatu negara memiliki kekuasaan tertinggi dan bersifat anarki. Menurut Dunne dkk (2013) realisme menggunakan negara sebagai refleksi perilaku individu (manusia) yang berada di dalam negara tersebut, yang dimana manusia merupakan makhluk egois dan bersifat

pesimistik (Dunne et al., 2013). Morgenthau (1985) menjelaskan bahwa dalam realisme, negara akan mengejar kepentingan nasionalnya, yang dimana hal tersebut dijadikan sebagai kebijakan luar negeri dan kekuasaan (power) memiliki peran penting dalam memahami perilaku dan motif dari suatu negara (J. H. Morgenthau, 1985). Dalam penelitian ini, realisme digunakan untuk menjelaskan bagaimana kepentingan nasional baik China maupun Jepang mempengaruhi keputusan politik mengenai permasalahan klaim kepulauan Senkaku atau Diaoyu.

Realisme dalam hubungan internasional sering disebut sebagai power politics. Ini adalah pendekatan yang sangat berpengaruh dalam pemikiran dan kebijakan internasional. Paradigma realisme ini muncul setelah Perang Dunia II (1940-an) dan dominan hingga sekitar tahun 1980-an. Kehadiran Amerika Serikat sebagai kekuatan utama pada masa itu juga berkontribusi pada dominasi paradigma realisme ini. Bahkan, pemerintah Amerika cenderung mendorong penelitian lebih lanjut dalam hubungan internasional untuk memahami Tindakan negara adidaya ini dimasa depan (Nurhamni, 2018).

Pemikiran awal dalam paradigma realisme terdiri dari tiga prinsip utama. Prinsip pertama menyatakan bahwa negara adalah pihak yang paling penting dalam hubungan internasional. Prinsip kedua menekankan perbedaan yang jelas antara urusan politik dalam negeri dan politik internasional. Prinsip ketiga menitikberatkan pada kekuatan dan perdamaian sebagai fokus utama dalam studi hubungan internasional. Karya-karya yang dianggap sebagai landasan untuk pengembangan paradigma realisme ini termasuk *Politics Among Nations* oleh Morgenthau dan *The Twenty years Crisis* oleh E.H. Carr (Nurhamni, 2018).

Sebagai paradigma, realisme memiliki empat ide dan asumsi dasar. Pertama, realisme memiliki pandangan skeptis terhadap sifat manusia. Kedua, realisme meyakini bahwa hubungan internasional pada dasarnya penuh dengan konflik, dan bahwa konflik internasional pada akhirnya dapat diselesaikan melalui perang. Ketiga, realisme sangat menghargai nilai-nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara. Keempat, realisme memiliki keraguan mendasar terhadap kemajuan dalam politik internasional, seperti yang sering terjadi dalam politik dalam negeri. Pemikiran dan asumsi ini memengaruhi cara berpikir Sebagian besar reoritis HI realis, baik di masa lalu maupun di masa depan (Antunes & Camisao, 2018).

Sejak Perang Dunia II, pemikiran realis telah mendominasi cara pandang negara-negara dalam menjalin hubungan internasional dan cara para akademisi mempelajari politik dunia. Selama berpuluh-puluh tahun, realisme menjadi teori utama dalam studi hubungan internasional di Eropa Barat dan Amerika Serikat (Boucher, 1998). (BAYLIS JOHN, SMITH STEVE, 2023, p. 133). Menurut pemahaman umum disiplin HI, realisme muncul di pertengahan abad ke-20 sebagai respon atas kegagalan organisasi internasional dalam mencegah perang besar antar negara besar. Para cendekiawan seperti Inggris dan Amerika, seperti E.H. Carr dan Hans Morgenthau, mengkritik mereka yang percaya bahwa kerjasama internasional dapat mencegah konflik global sebagai “idealis” dan “utopis”. Para penganut realisme ini menawarkan pandangan alternatif yang menjadikan kekuasaan sebagai inti dari politik internasional (Molloy, 2006). (BAYLIS JOHN, SMITH STEVE, 2023, p. 133).

Realisme lebih focus pada kepentingan nasional daripada ideologi, mencari perdamaian melalui kekuatan, dan menerima keberagaman dalam hubungan

internasional. Para ahli teori realis meyakini bahwa negara adalah actor utama dalam HI, lebih penting daripada organisasi internasional, individu, atau Perusahaan. Dalam Sejarah awal HI, perdebatan antara realisme dan idealism menjadi dasar studi akademis HI, dengan masing-masing teori mewakili paradigma yang berlawanan, yaitu seperangkat konsep dasar yang digunakan untuk menjelaskan politik internasional.

Berikut ini adalah beberapa poin kunci paradigma realisme yakni:

1. System internasional bersifat anarki, tanpa otoritas pusat yang mengatur hubungan antar negara
2. Negara adalah actor utama HI, bertindak berdasarkan kepentingan nasional mereka.
3. Kekuatan adalah faktor penting dalam hubungan internasional, digunakan untuk mencapai tujuan nasional
4. Perdamaian paling baik dicapai melalui keseimbangan kekuatan dan pencegahan
5. Kerjasama internasional dimungkinkan, tetapi didasarkan pada kepentingan negara.

Bagi para penganut realisme, perebutan kekuasaan adalah sifat dasar dalam hubungan antar negara di dunia. Mereka, seperti Hans Morgenthau, mendefinisikan kekuasaan sebagai “kendali manusia atas pikiran dan tindakan manusia lain” dan percaya bahwa perebutan kekuasaan adalah hal yang wajar dan selalu terjadi dimanapun dan kapanpun (Morgenthau 1955 [1948] :26,17). (BAYLIS JOHN, SMITH STEVE, 2023, p. 134).

Akibatnya, konflik internasional selalu berpotensi terjadi. Para pemimpin negara, meskipun berusaha keras, tidak dapat sepenuhnya menghilangkan resiko perang. Oleh karena itu, negara-negara selalu hidup dalam ketidakpastian tentang

kekuatan dan niat negara lain, baik dengan ofensif atau defensif (Jervis 1978; Van Evera 1999:1-10). (BAYLIS JOHN, SMITH STEVE, 2023, p. 134).

Kekuatan diukur dan dijalankan dalam interaksi dengan negara lain. Para ahli teori realis telah mengusulkan berbagai cara untuk menilai dan mengukur kekuatan suatu negara dalam hubungan internasional. Para neorealis seperti Kenneth Waltz menggunakan istilah kapabilitas untuk mengukur kekuatan negara berdasarkan “ukuran populasi dan wilayah, sumber daya alam, kemampuan ekonomi, kekuatan militer, stabilitas politik, dan kompetensi” (Waltz 1979:131). (BAYLIS JOHN, SMITH STEVE, 2023, p. 134).

Teori realisme dalam hubungan internasional menekankan pentingnya peran negara sebagai actor utama dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Dalam situasi dan konteks yang demikian mengenai kebijakan luar negeri China terhadap Jepang dapat dianalisis atau dilihat sebagai upaya China untuk mempertahankan atau meningkatkan kekuatan dan pengaruhnya di Kawasan Asia Timur. China mungkin menggunakan klaim Kepulauan Senkaku sebagai strategi geopolitik untuk memperkuat posisinya di wilayah tersebut. Analisis realis akan mempertimbangkan faktor seperti kekuatan militer, kepentingan ekonomi, dan bagaimana keseimbangan kekuasaan regional tersebut dapat mengalami perubahan (Antunes & Camisao, 2018).

2.2.2 Neorealisme

Neorealisme adalah teori hubungan internasional yang dikembangkan oleh Kenneth Waltz pada tahun 1979. Teori ini menggabungkan elemen dari realisme klasik dan neoklasik (Jackson & Sørensen, 2015).

Munculnya Neorealisme.

1. Tantangan terhadap teori independensi: Neorealisme muncul sebagai respon terhadap teori-teori lain dalam hubungan internasional yang tidak mampu menjelaskan secara memadai perilaku negara dalam system internasional.
2. Kekurangan realisme : Neorealisme juga bertujuan untuk memperbaiki kekurangan realisme klasik yang dipelopori oleh Hans Morgenthau, yang dianggap kurang memperhatikan faktor ekonomi dalam hubungan internasional (H. J. Morgenthau, 1948).

Poin-poin penting Neorealisme:

1. Fokus pada system internasional, yang dimana Neorealisme ini tidak focus pada sifat dasar manusia atau etika negara seperti realisme klasik
2. Penjelasan ilmiah, yang dimana Neorealisme berusaha memberikan penjelasan yang ilmiah tentang bagaimana sistem internasional itu bekerja.
3. Prediktabilitas, yakni Neorealisme memungkinkan kita untuk memprediksi bagaimana negara itu akan berperilaku dalam situasi tertentu.
4. Kapasitas sebuah negara, Waltz berpendapat bahwa faktor terpenting dalam hubungan internasional yaitu kapasitas negara atau kapabilitas negara, yang diukur berdasarkan faktor-faktor seperti populasi penduduk, wilayah, sumber daya alam, kekuatan militer, dan stabilitas politik (Waltz, 1979 :99). (Kenneth, 1979).

Neorealisme, meskipun merupakan pengembangan dari teori realisme, tetap memegang beberapa konsep dasar realisme klasik. Salah satunya ialah pemahaman bahwa hubungan antar negara pada dasarnya konfliktual karena system internasional yang anarkis, tanpa otoritas pusat yang mengatur.

Menurut Kenneth Waltz, pakar Neorealisme terkemuka, pendekatan terbaik dalam memahami hubungan internasional adalah dengan focus pada struktur system, unit-unit yang berinteraksi, kesinambungan dan, perubahan system (Burchill et al., 2005). Artinya :

1. Neorealisme itu lebih menekankan pada struktur system internasional saebagai faktor penentu perilaku negara, bukan pada negara itu sendiri.
2. Unit analisis dalam Neorealisme itu adalah interaksi yang dilakukan oleh antar negara dalam satu ruang lingkup.
3. Neorealisme juga dikenal seabgai “realisme structural” yaitu karena menganggap bahwa negara-negara itu terikat oleh sebuah struktur system yang lebih besar, sehingga bukan hanya oleh kepentingan atau keinginan mereka sendiri. (Burchill et al., 2005).

2.2.3 Realisme Defensif

Realisme defensif adalah bagian penting dari neorealisme atau realisme structural. Menurut Waltz, sifat anarki dalam system internasional membuat negara-negara cenderung mengambil kebijakan yang lebih defensive dan moderat. Hal ini dikarenakan negara-negara pada dasarnya tidak agresif. Tujuan utama mereka bukan untuk mendapatkan kekuatan sebesar mungkin, tetapi untuk menjaga posisi mereka dalam system interansional (Kenneth, 1979). Dilema keamanan adalah konsep utama dalam realisme defensive. Karena system internasional yang bersifat anarki, maka kelangsungan hidup menjadi tujuan utama negara. Dalam konsep ini, negara selalu bersikap pesimis dan tidak mempercayai niat negara lain (BAYLIS JOHN, SMITH STEVE, 2005). Oleh karena itu, negara selalu berusaha untuk meningkatkan keamanan

nasionalnya dari ancaman dalam dan luar negeri. Situasi inilah yang menyebabkan adanya dilemma keamanan. (Kenneth, 1979).

2.2.4 Realisme Ofensif

Realisme defensive berbeda dari realisme ofensif yang berpendapat bahwa system anarki membuat negara cenderung memperluas wilayah secara agresif dan mengambil tindakan keras untuk meningkatkan keamanan melalui kekuatan. Oleh karena itu, tindakan defensive lebih diperlukan (Ikenberry & Mearsheimer, 2001). Realisme ofensif percaya pada tiga pola umum perilaku : *fear, self-help, and power maximazitation*. Pola ini muncul karena negara-negara dengan kekuatan dan kemampuan besar cenderung berpikir dan bertindak agresif terhadap negara lain (Ikenberry & Mearsheimer, 2001). Realisme ofensif melihat negara sebagai actor yang agresif dalam memaksimalkan kekuatan, bukan hanya keamanan. Menurut Mearsheimer, realisme ofensif mendorong negara untuk terus berusaha memperkuat dominasi, meskipun ini sulit dicapai dalam system internasional saat ini (Ikenberry & Mearsheimer, 2001). Tidak hanya dalam realisme defensive, dalam realisme ofensif pun demikian, dilemma keamanan bisa terjadi. Realisme berpendapat bahwa tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk meningkatkan keamanannya sendiri seringkali menurunkan Tingkat keamanan negara lain. Karena itu, sulit bagi sebuah negara untuk terus memperkuat kekuatannya tanpa mengancam kelangsungan hidup negara lain (Ikenberry & Mearsheimer, 2001). Dilemma keamanan tentu tidak akan terjadi jika suatu negara bisa diyakinkan bahwa negara lain pasti tidak akan menyerang terlebih dahulu (Wagner, 2007)

2.2.5 Keamanan Nasional

Keamanan nasional adalah kebutuhan pokok untuk melindungi dan menjaga kepentingan suatu negara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi, dan militer untuk mengatasi berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negara. Keamanan nasional juga berarti menjaga eksistensi negara dengan memperkuat kekuatan ekonomi, militer, dan politik, serta mengembangkan diplomasi. Dalam konsep ini, yang penting adalah kemampuan pemerintah untuk menjaga integritas wilayah negara dari ancaman yang muncul baik dari luar maupun dari dalam negeri (Azizah, 2021).

Konsep keamanan nasional masih memiliki banyak variasi dalam arti dan definisinya hingga saat ini. Arti dari keamanan ini tergantung pada konteks yang digunakan. Ada beberapa jenis keamanan, seperti Keamanan Negara, Keamanan Internasional, Keamanan Manusia, dan Keamanan Publik. Menurut Barry Buzan ia mengatakan bahwa *“if a multisector approach to security was to be fully meaningful, referent objects other than the state had to be allowed into the picture.”* (Barry Buzan, 1991).

Buzan membagi masalah keamanan menjadi lima sektor dan menjelaskan bagaimana interaksi terjadi di setiap sektor tersebut. Topik-topik yang ditekankan oleh Buzan mencakup: Militer (kekuatan bersenjata); Politik (kekuasaan, status, dukungan pemerintah); Ekonomi (perdagangan, industry, keuangan) Sosial (identitas kelompok); dan Lingkungan (aktivitas manusia dan lingkungan alam). Bukan hanya negara yang terlibat, tetapi juga organisasi internasional baik yang bersifat global maupun regional. Selain itu, aktor yang terlibat tidak hanya terbatas pada negara, tetapi juga meliputi

organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, serta kelompok pemangku kepentingan seperti Perusahaan multinasional, individu, dan partai politik (Barry Buzan, 1991). Selain itu Buzan juga menyatakan bahwa agenda tersebut ditentukan oleh kepentingan nasional. Buku yang berjudul *People, States, and Fear* yang ditulis oleh Buzan bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang tantangan keamanan nasional. Dalam bukunya, Buzan berusaha untuk mengembangkan agenda keamanan, meskipun fokusnya tetap pada negara (Barry Buzan, 1991).

Menurut David A. Baldwin dalam tulisannya yang berjudul '*The Concept of Security*' (1997). Secara konseptual, pemahaman tentang keamanan masih belum sepenuhnya jelas, terutama sejak abad ke-19. Masih banyak pandangan yang menyatakan bahwa konsep keamanan perlu ditinjau kembali atau dikritisi karena kurangnya analisis yang mendalam terhadapnya. Jika Buzan mencoba untuk merangkum lima alasan mengapa orang mengabaikan konsep keamanan, Baldwin mengemukakan bahwa konsep tersebut sulit dipahami karena adanya tumpang tindih antara konsep keamanan dan kekuasaan. Selain itu, kritikus realis juga kurang tertarik pada masalah keamanan, dan para ahli keamanan sering kali terlalu sibuk. Selain itu, ada kebingungan tentang makna "keamanan nasional" dalam menghadapi kemajuan teknologi dan perubahan politik yang terus berkembang (Baldwin, 1997). Baldwin berpendapat "*the point of departure is Wolfers' characterization of security as 'the absence of threats to acquired values' , which seems to capture the basic intuitive notion underlying most uses of the term security*".

Keamanan nasional adalah bagian khusus dari politik. Semua masalah keamanan adalah masalah politik. Namun, tidak semua konflik politik dianggap

sebagai masalah keamanan. Keamanan menjadi kontroversi dalam politik ketika actor politik mengancam atau menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan mereka dari pihak lain (Kolodziej, 2005). Keamanan bisa berarti menjaga wilayah atau integritas negara dari ancaman luar, seperti konflik antar negara untuk memperluas wilayah. Ini bisa membantu negara menambah kekuatan dalam menghadapi ancaman militer dan menjaga keamanan. Konsep keamanan tradisional lebih berfokus pada negara, terutama dalam hal militer dan politik. Dalam konteks ini, keamanan dapat diinterpretasikan sebagai cara negara bertahan hidup menurut isu-isu tradisional. Ancaman yang terkait dengan objek seperti negara, pemerintah, wilayah, atau masyarakat biasanya dianggap sebagai masalah keamanan dalam politik militer (Al Araf & Anton Aliabbas, 2007).

Konsep keamanan nasional menunjukkan bagaimana negara dapat membuat kebijakan luar negeri untuk memproteksi keamanan dan kepentingan bangsa mereka. Dalam hal ini, China mungkin melihat klaimnya atas Kepulauan Senkaku sebagai bagian dari upaya untuk menjaga sumber daya alam yang penting, seperti cadangan energi potensial dan sumber daya perikanan yang berada disekitarnya. Analisis keamanan nasional mengkaji potensi ancaman terhadap keamanan ekonomi dan strategis Tiongkok serta upaya atau Langkah-langkah untuk mengatasi ancaman tersebut (Azizah, 2021).

2.2.6 Balance Of Power

Konsep keseimbangan kekuatan, atau “Balance of Power,” menjelaskan bahwa setiap negara berusaha untuk menjaga kekuatan mereka agar sejajar dengan negara-

negara saingannya untuk melindungi diri mereka sendiri. Ada beberapa cara yang digunakan oleh suatu negara untuk mencapai keseimbangan ini, seperti bekerja sama dengan negara lain, memperkuat kemampuan militer, memperluas wilayah, dan lain sebagainya. Kenneth Waltz menjelaskan argumennya tentang keseimbangan kekuatan: keseimbangan kekuatan akan muncul Ketika terdapat system politik internasional yang tidak memiliki pemerintahan sentral yang efektif dan diisi oleh negara-negara yang ingin mempertahankan eksistensinya (Kenneth, 1979). Balance of power adalah gagasan yang sering digunakan dalam situasi dimana negara-negara berusaha untuk menjaga agar kekuasaan tidak terlalu condong kepada satu pihak dalam system internasional.

Teori balance of power mengungkapkan bahwa negara-negara bersaing untuk mempertahankan diri mereka sendiri, sehingga persaingan untuk memperoleh kekuasaan adalah sesuatu yang umum terjadi (Paul, 2004). Kompetisi antara negara dianggap tidak adil karena setiap negara memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Negara-negara yang bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk bertahan akan memiliki keunggulan, sementara negara-negara yang harus bergantung pada bantuan negara lain cenderung membentuk aliansi dengan negara yang lebih kuat (Paul, 2004).

Morgenthau mengatakan bahwa Ketika kita mengukur kekuasaan dalam konsep keseimbangan kekuatan, kita melihat pada faktor-faktor seperti politik, geografi, ekonomi, dan budaya sosial. Secara umum, kekuatan suatu negara sering kali digambarkan melalui aspek militer, ekonomi, dan politik di tingkat antar-negara. Ketiga hal ini memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan sejauh mana kekuatan suatu negara (H. J. Morgenthau, 1948).

Teori “Balance of Power” (Keseimbangan Kekuasaan) merupakan salah satu kerangka teori yang relevan dalam analisis politik luar negeri Tiongkok terhadap Jepang dalam konteks klaim kepemilikan Kepulauan Senkaku.

Menelaah kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap Jepang dalam klaim kepemilikan kepulauan Senkaku, teori Balance of Power menjadi kerangka analisis utama. Teori ini menekankan pada peran Balance of Power dalam hubungan internasional dan bagaimana negara menyikapi perubahan di Kawasan tersebut. Dalam konteks ini, kajian ini mengkaji bagaimana upaya Tiongkok untuk memperkuat klaimnya atas Kepulauan Senkaku yang dimana akan mempengaruhi keseimbangan kekuatan dalam dinamika Kawasan Asia Timur dan bagaimana Jepang maupun negara-negara lain merespon upaya yang telah dilakukan oleh Tiongkok.

2.2.7 Foreign Policy

Kebijakan luar negeri adalah bagian penting dari rencana yang diterapkan oleh suatu negara yang memiliki kedaulatan. Dalam dunia internasional, kebijakan luar negeri adalah alat yang sangat penting bagi suatu negara untuk berinteraksi dan memenuhi kebutuhan di dalam negerinya. Ini karena hanya dengan kebijakan luar negeri saja, sebuah negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya, terutama untuk rakyat didalamnya. Kebijakan luar negeri sangat terkait dengan kebijakan dalam negeri suatu negara, karena kebijakan luar negeri seringkali digunakan untuk melengkapi kebijakan dalam negeri dan juga sebagai cara untuk menjaga keberlangsungan negara tersebut dalam politik internasional. Setiap negara tidak dapat mencapai semua kepentingan nasionalnya hanya dengan mengandalkan kebijakan dalam negeri, inilah

mengapa kebijakan luar negeri muncul, karena negara-negara bergantung satu sama lain dalam banyak hal (Tatiwakeng, 2018).

Menurut Mark R Amstutz(1995) didalam jurnal yang ditulis oleh (Tatiwakeng, 2018), menjelaskan kebijakan luar negeri sebagai Langkah-langkah yang diambil oleh peemrintah, baik secara terbuka maupun tersirat, dengan tujuan untuk mendukung kepentingan nasional di tingkat internasional. Dalam definisinya, terdapat tiga poin yang penting yang perlu diketahui, yaitu Tindakan atau Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, upaya untuk mencapai kepentingan nasional, dan fakta bahwa kebijakan luar negeri dapat mencakup area yang lebih luas daripada wilayah negara itu sendiri.

Kebijakan luar negeri adalah sautu teori yang dikemukakan oleh KJ. Holsti. Menruut teorinya, kebijakan luar negeri adalah ide atau gagasan untuk menyelesaikan masalah atau membuat perubahan di wilayah lain. Meskipun setiap negara memiliki tujuan dan kebijakan yang berbeda, kebijakan luar negeri membuat mereka perlu bekerja sama dan memahami satu sama lain untuk mencapai kepentingan pribadi dan berssama. Ini adalah langkah yang dilakukan oleh setiap negara untuk mendapatkan keuntungan dengan mempengaruhi negara lain, memperoleh reputasi, dan menjaga keamanan bersama. Dalam teori kebijakan luar negeri, ada tiga tujuan utama negara dalam membentuk dan melaksanakan kebijakan luar negeri diantaranya;

1. Nilai-nilai yang dimiliki oleh sebuah negara adalah faktor penting yang mendorong pembentukan kebijakan luar negeri, karena kebijakan tersebut dibuat berdasarkan nilai-nilai tersebut.

2. Waktu adalah faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri, di mana target-target harus tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
3. Jenis tuntutan tujuan adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, sesuai dengan penjelasan K.J. Holsti pada tahun 1983.
4. Dalam merancang dan melaksanakan kebijakan luar negeri, negara mempertimbangkan dasar-dasar dan asumsi-asumsi tertentu yang memperhitungkan keamanan nasional. Komponen-komponen yang digunakan dalam kebijakan luar negeri meliputi pandangan, sikap, keputusan, dan tindakan yang harus diambil sesuai dengan pertimbangan yang tepat, sebagaimana dijelaskan oleh K.J. Holsti pada tahun 1983.

Kebijakan luar negeri mengacu pada cara suatu negara berhubungan dengan negara-negara dan actor-aktor internasional lainnya. Menurut pandangan realis, kebijakan luar negeri muncul karena pengaruh dari luar dan dibuat secara terbuka dengan tujuan memengaruhi negara-negara atau actor lain di dunia internasional. Bagi mereka, alasan utama adanya kebijakan luar negeri adalah untuk menjaga kepentingan nasional dan kelangsungan hidup negara dalam politik internasional. Disisi lain, kaum liberal melihat kebijakan luar negeri sebagai alat untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan negara-negara dan actor lain melalui diplomasi. Kebijakan luar negeri melibatkan strategi, Tindakan, metode, tujuan, perjanjian, dan pertimbangan penting karena mencerminkan kepentingan yang lebih luas daripada satu kelompok saja. Biasanya, presiden, perdana Menteri, Menteri luar negeri, Menteri pertahanan, Menteri

keuangan, dan sebagainya adalah actor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan luar negeri (Tatiwakeng, 2018).

Foreign policy sangat relevansi dalam konteks sengketa wilayah yang ada di Kawasan asia timur, dengan demikian foreign policy memiliki peran yang cukup baik dimana terdapat beberapa faktor dalam strategi untuk menghadapi klaim kepemilikan kepulauan Senkaku yang di lakukan oleh China terhadap Jepang.

2.2.8 Kepentingan Nasional

Penelitian ini juga menggunakan kepentingan nasional dalam menganalisis fenomena penelitian. Kepentingan nasional merupakan konsep dasar dalam hubungan internasional, yang dimana konsep tersebut merujuk pada tujuan, kebutuhan, dan nilai yang dianggap penting oleh suatu negara, yang kemudian dapat menentukan kebijakan luar negeri dan perilaku negara di arena internasional. Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai kepentingan nasional. Morgenthau (1948) mendefinisikan kepentingan nasional sebagai suatu prinsip yang mengarahkan kebijakan luar negeri suatu negara, dan kepentingan tersebut didasari kebutuhan untuk mempertahankan kekuasaan serta keselamatan negara, Morgenthau menekankan bahwa dunia berada dalam kondisi yang penuh ketidakpastian dan persaingan, sehingga negara harus menjaga dan memperluas kekuasaannya untuk dapat bertahan hidup (H. J. Morgenthau, 1948). Sedangkan Waltz (1979) berpendapat bahwa kepentingan nasional dari suatu negara ditentukan oleh struktur internasional yang mengharuskan negara untuk dapat bertahan hidup dan berfungsi dalam sistem internasional yang bersifat anarkis dan kompetitif (Kenneth, 1979).

Dalam praktiknya, kepentingan nasional mencakup berbagai aspek secara luas yang berhubungan dengan kelangsungan hidup negara seperti keamanan dan kekuatan, ekonomi, ideologi, sosial, dan budaya. Terkait relasi kepentingan nasional dan kekuatan dalam hubungan internasional, dua konsep tersebut saling terkait satu sama lain. Kepentingan nasional mengacu pada tujuan yang dianggap penting untuk dicapai oleh suatu negara guna memastikan kelangsungan hidup, keamanan, kemakmuran, dan identitasnya dalam system internasional. Sedangkan kekuatan dalam bentuk apapun baik militer, ekonomi, atau pengaruh diplomatic merupakan sarana utama yang dapat digunakan oleh negara untuk dapat mencapai dan melindungi kepentingan nasional yang dimilikinya. Dalam konteks hubungan internasional, negara merupakan aktor rasional yang bertindak untuk mencapai kepentingan nasional yang diinginkan dengan memanfaatkan berbagai bentuk keuatan, hal tersebut menunjukkan bentuk keterkaitan antara kepentingan nasional dan kekuatan dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, teori kepentingan nasional dan teori kekuatan saling melengkapi dan seringkali digunakan bersama untuk menjelaskan kebijakan luar negeri dari suatu negara dan bentuk interaksi antarnegara yang dilakukan di arena internasional.

Dalam realisme, kepentingan nasional dari suatu negara, berkaitan secara langsung dengan pencapaian dan perluasan kekuatan. Menurut Gilpin (1981), negara berupaya untuk mengoptimalkan kekuatan mereka untuk dapat memenuhi kepentingan nasionalnya dalam berbagai aspek, seperti militer, ekonomi, maupun diplomasi. Untuk mencapai kepentingan nasional yang dikehendaki, negara dapat menggunakan berbagai bentuk kekuatan yang berfungsi sebagai penopang dan penggerak, kepentingan nasional seringkali menentukan jenis kekuatan yang perlu diperoleh atau

digunakan oleh negara, hal ini menunjukkan perlu adanya kesesuaian antara kepentingan nasional dengan jenis kekuatan yang digunakan seperti kekuatan militer dan kekuatan ekonomi. Penggunaan kekuatan militer dapat menjadi prioritas bagi negara yang sedang dihadapkan pada ancaman terhadap kedaulatannya, sedangkan kekuatan ekonomi lebih penting bagi negara yang memiliki kepentingan untuk memperluas pengaruhnya di pasar global atau yang memiliki ketergantungan pada akses sumber daya yang tidak dimiliki oleh negaranya (Robert, 1981). Dalam konteks klaim China atas klaim kepulauan Senkaku atau Diaoyu, dalam penelitian ini, kepentingan nasional digunakan untuk menjelaskan bagaimana kepentingan strategis di kawasan Asia Timur mempengaruhi sikap dan tindakan China dan Jepang terhadap klaim kepulauan Senkaku atau Diaoyu. Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang penulis ajukan, penulis menggunakan beberapa konsep yang ada di dalam teori Realisme Klasik tersebut yakni konsep Kepentingan Nasional, Kebijakan Luar Negeri dan Power.

2.2.9 Geopolitik

Geopolitik merupakan studi mengenai pengaruh faktor-faktor geografi seperti lokasi, sumber daya alam, dan topografi dapat mempengaruhi kebijakan politik dan strategi internasional dari berbagai negara. Geopolitik mengkaji keterkaitan kekuatan politik dengan ruang geografi, serta bagaimana negara-negara menggunakan posisi geografis mereka untuk mencapai suatu tujuan politik dan strategis yang mereka miliki. Konsep geopolitik juga turut mencakup bagaimana adanya pergeseran distribusi kekuatan global dapat terjadi sebagai akibat pengaruh dari perubahan kondisi geografis

dan juga adanya perkembangan teknologi. Dalam konteks hubungan internasional, geopolitik mengkaji bagaimana lokasi geografi, sumber daya alam, dan faktor-faktor fisik lainnya dapat memengaruhi hubungan antara negara-negara. Terdapat beberapa pandangan geopolitik yang dikemukakan para ahli, seperti geopolitik klasik yang menekankan pada penggunaan unsur hard power. McKinder dalam Cohen (2014) mengedepankan dua elemen yaitu Heartland dan World Island, Heartland merupakan wilayah yang disebut dengan Eurasia, wilayah tersebut sulit dipenetrasi melalui kekuatan laut dan memiliki potensi kekayaan sumber daya alam, berdasar hal tersebut, McKinder menyatakan bahwa siapa pun yang berhasil mengendalikan Heartland maka dapat mengendalikan World Island, kemudian dia dapat mengendalikan dunia (Cohen, 2014). Dalam teori geopolitik klasik yang dikemukakan oleh McKinder tersebut menekankan pada penggunaan unsur hard power.

Geopolitik dalam konsep kekuatan maritim yang dikemukakan oleh Mahan (1890) beranggapan bahwa negara-negara yang menguasai jalur pelayaran internasional dan perairan strategis akan mendapatkan kekuatan besar dalam politik global, adanya kendali atas laut memungkinkan suatu negara untuk dapat memproyeksikan kekuatan militernya, mengendalikan perdagangan dan mengakses sumber daya alam. Dalam argumentasi Mahan tersebut menekankan pada pentingnya kekuatan laut yang tidak hanya berfungsi sebagai alat militer, tetapi juga sebagai suatu sarana bagi negara untuk dapat mengendalikan jalur perdagangan dan komunikasi internasional, oleh karena itu, adanya kendali atas perairan strategis, dan adanya

kemampuan untuk membangun armada yang kuat merupakan faktor penting untuk dapat mewujudkan dominasi global (Mahan, 1890).

Teori geopolitik yang dikemukakan oleh Mahan memiliki relevansi dengan kasus klaim atas kepulauan Senkaku. Dalam konteks sengketa kalim Kepulauan Senkaku, klaim yang dilakukan oleh China dan Jepang terhadap kepulauan Senkaku dilakukan atas dasar upaya untuk menguasai nilai strategis dari Kepulauan Senkaku. Dalam penelitian ini, geopolitik dalam hal ini adalah kekuatan maritim, digunakan untuk menganalisis nilai strategis Kepulauan Senkaku yang kemudian memicu negara-negara untuk mengklaim kepemilikan atas wilayah tersebut.

2.2.10 Teori Diplomasi

Penelitian ini juga menggunakan teori diplomasi. Berridge (2015) mendefinisikan diplomasi sebagai suatu proses komunikasi yang diorganisir oleh negara dengan negara lain dengan tujuan untuk mempromosikan kebijakan luar negeri mereka, mengelola hubungan, dan memecahkan permasalahan secara bersama, dalam diplomasi juga terdapat dua elemen utama yaitu komunikasi dan negosiasi yang dapat mempengaruhi hubungan antar negara (Berridge, 2015). Diplomasi dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk penyelesaian konflik, yang dimana penggunaan diplomasi dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan tanpa melibatkan penggunaan kekerasan. Menurut Zartman (2001) diplomasi dalam konteks resolusi konflik memiliki tujuan untuk menciptakan konsensus dan meredakan ketegangan pada semua pihak yang bertikai (W. Zartman, 2001).

Dalam konteks penyelesaian sengketa dan konflik, terdapat beberapa jenis teori diplomasi. Dalam diplomasi mediasi, Zartman (2000) menjelaskan bahwa mediasi memiliki peran penting untuk "mengatur ruang untuk negosiasi" antara setiap pihak yang terlibat dalam suatu konflik, untuk kemudian menyediakan kesempatan bagi setiap pihak untuk mendiskusikan solusi damai yang mungkin tidak dapat tercapai tanpa adanya peran mediator. Mediasi dalam diplomasi konflik merujuk pada peran suatu pihak yang bersifat netral, pihak tersebut berperan memfasilitasi dialog antara dua pihak yang bermasalahan, dalam menjalani perannya, mediator tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi justru berperan untuk membantu semua pihak untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, adanya mediasi tersebut diharapkan dapat meredakan ketegangan dan mencegah terjadinya eskalasi yang bahkan dapat menyebabkan terjadinya perang (I. W. Zartman, 1989). Selain mediasi, diplomasi dalam konteks penyelesaian sengketa dan konflik juga dapat dilakukan melalui negosiasi. Menurut Fisher dan Ury (1981) negosiasi berbasis prinsip berfokus pada kebutuhan dan kepentingan dari setiap pihak yang bermasalahan, bukan posisi dari setiap pihak. Dalam negosiasi menekankan pertemuan antara semua pihak yang bermasalahan untuk mencari solusi dengan menggunakan cara kompromi dan tawar-menawar, dalam teori ini, penyelesaian masalah tidak dilakukan melalui paksaan, tetapi melalui dialog untuk mencapai kesepakatan bersama dengan berfokus capaian hasil yang menguntungkan semua pihak (Fisher et al., 1981).

Selain mediasi dan negosiasi, diplomasi untuk penyelesaian sengketa dan konflik juga dapat dilakukan melalui arbitrase. Shany (2001) menjelaskan bahwa arbitrase merupakan alat yang kuat dalam penyelesaian sengketa internasional, hal ini

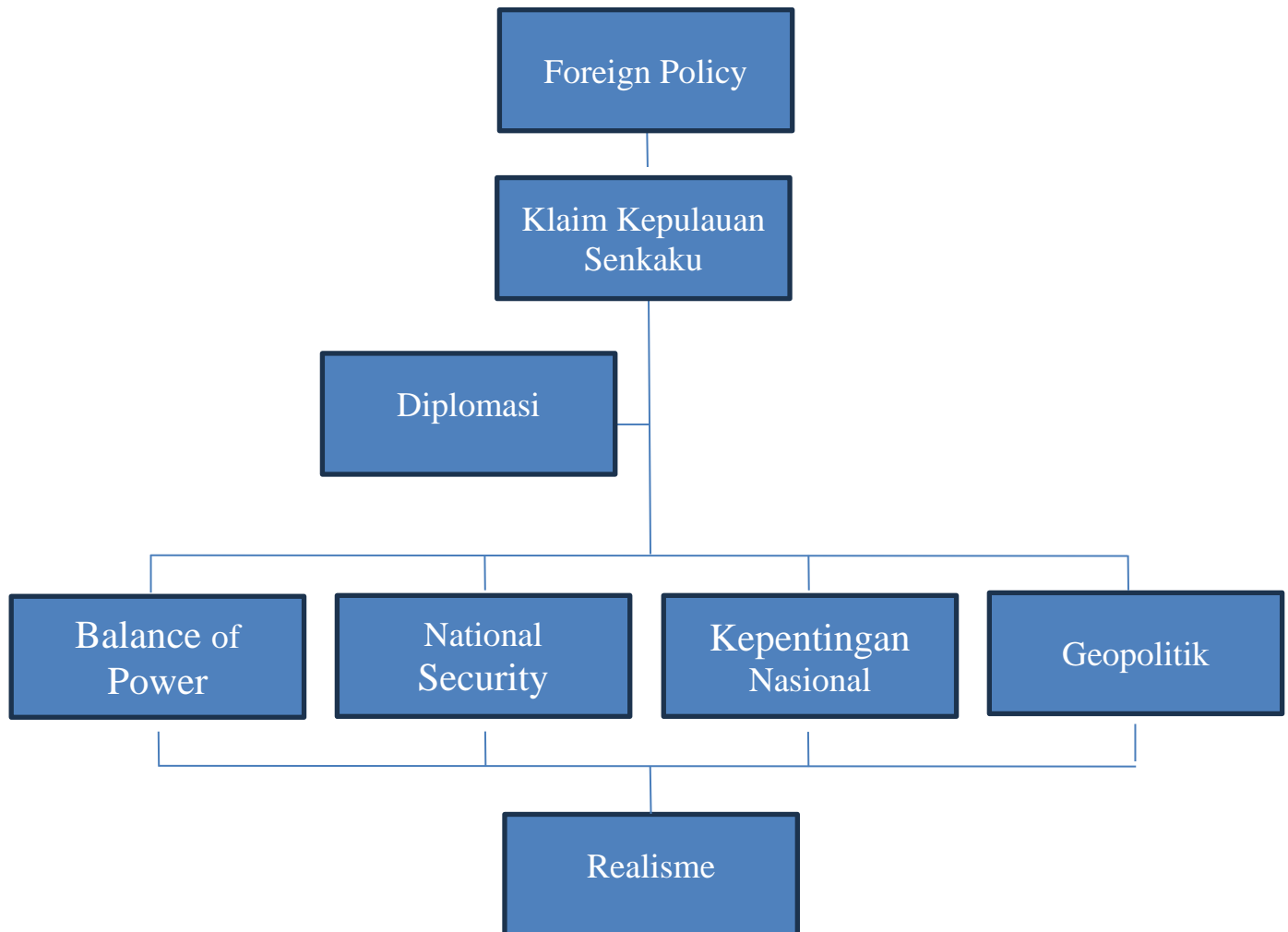
dikarenakan, arbitrase dapat memberikan solusi yang bersifat objektif, karena tidak bergantung pada kehendak politik dari pihak manapun yang terlibat dalam sengketa. Arbitrase menjadi cara yang sering digunakan apabila negosiasi atau mediasi gagal untuk menemukan solusi penyelesaian sengketa. Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral, pihak tersebut diberikan wewenang untuk membuat keputusan yang bersifat mengikat bagi semua pihak (Shany, 2001). Dalam penelitian ini, teori diplomasi dalam penyelesaian sengketa dan konflik digunakan untuk menjelaskan proses penyelesaian sengketa klaim pulau Senkaku oleh Jepang dan China, seperti bagaimana proses penyelesaian sengketa, tuntutan setiap pihak, dan juga hasil dari penyelesaian sengketa.

2.2 Asumsi Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, studi ini membangun asumsi bahwa sengketa dipengaruhi oleh interaksi kedua negara, khususnya upaya menjaga posisi dalam tatanan regional. Secara konstitusional, posisi Jepang terbatas dengan menggunakan kekuatan militernya secara ofensif karena masih tergantung pada perlindungan Amerika Serikat, namun berbagai tindakan Jepang terhadap Kepulauan Senkaku, diinterpretasikan China sebagai upaya Jepang memperkuat posisinya. Berdasarkan asumsi tersebut, China akan merespon tindakan Jepang melalui tindakan asertif. Respon ini sebagai upaya penegasan klaim kedaulatan China atas wilayah yang disengketakan, sekaligus upaya mempertahankan keseimbangan kekuatan. Berdasarkan argumen tersebut, asumsi utama studi Adalah tindakan asertivitas China merupakan bentuk reaksi terhadap tindakan Jepang yang mengancam dan merupakan strategi China untuk menangkal pengaruh aliansi Jepang-Amerika Serikat.

2.4 Kerangka Analisis

Kerangka analisis dibangun dengan mengelaborasi perspektif realisme, neorealisme, dan keamanan nasional. Temuan studi literatur menunjukkan adanya relasi sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang bersifat historis, politis, strategis dan turut melibatkan kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat. Studi Hsiung mengidentifikasi konflik ini sebagai bentuk permusuhan yang dilatarbelakangi Sejarah, klaim territorial, dan ketidakpercayaan yang mendorong terhambatnya kompromi penyelesaian masalah. Temuan lainnya, memperkuat argument bahwa kedua pihak mempertahankan sikap agresif dan respon kebijakan yang menghambat penyelesaian masalah seperti pendirian ADIZ oleh China, respon *non-recognition* Jepang, dan intensifikasi nasionalisme domestik di kedua pihak yang semakin mempersulit penyelesaian masalah.



Studi terdahulu mengkaji tiga aspek yaitu sejarah klaim dan aspek legalitas, analisis kebijakan ADIZ, patrol, pengarahan militer dan diplomatik, serta adanya peran aktor eksternal yang turut mencampuri. Namun terdapat kesenjangan dalam berbagai studi terdahulu yaitu menonjolkan perspektif China sebagai aktor utama dalam masalah, yang menyebabkan analisis kebijakan Jepang menjadi terbatas. Temuan ini menjadi ruang yang dimanfaatkan penelitian ini untuk menawarkan perspektif baru terkait masalah ini. Untuk mengkaji temuan tersebut, studi menggunakan kerangka

teoritis yang dibentuk menggunakan pendekatan realisme dan turunannya. Penggunaan realisme klasik untuk memberikan pemahaman kepentingan nasional, kekuasaan, dan pencarian keamanan sebagai pendorong tindakan negara. Neorealisme dari Waltz mengenai struktur anarkis dalam system internasional memberikan penjelasan tentang kesulitan penyelesaian sengketa. Realisme defensive membantu menjelaskan sikap Jepang yang berupaya menyeimbangkan. Sebaliknya, realisme ofensif digunakan untuk memahami tindakan China yang berupaya unjuk kekuatan. Konsep keamanan nasional dan pendekatan multisector seperti Barry buzan menempatkan sengketa sebagai masalah multidimensi, tidak hanya militer, tetapi juga ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Dengan mengintegrasikan temuan kedalam kerangka teori, studi ini menempatkan isu penelitian sebagai kontestasi kekuatan dalam struktur internasional yang anarki, dengan adanya keterkaitan sumber daya, sejarah, dan strategi keamanan.